



**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

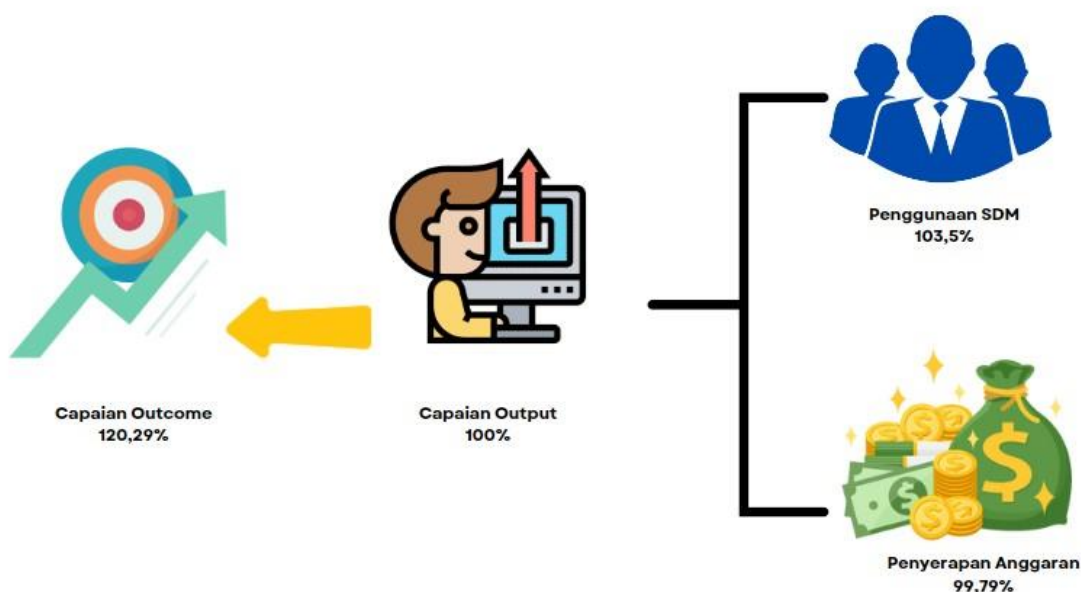
# **LAPORAN KINERJA**

**Biro Hukum dan Komunikasi  
Tahun 2023**

**Nomor: OT.04/S-1159/SU04/3/2023  
Tanggal 29 Desember 2023**

# Ringkasan Eksekutif

Tahun 2023 ini merupakan periode keempat Renstra BPKP 2020-2024. Dalam mendukung capaian kinerja dalam rencana strategis BPKP tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi memiliki empat sasaran *outcome*. Selama tahun 2023 ini capaian kinerja Biro Hukum dan Komunikasi yang terdiri dari empat sasaran tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut, digambarkan dalam skema sebagai berikut.



Capaian kinerja yang tinggi tersebut didukung oleh SDM yang kompeten, komitmen tim, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, dan tersedianya SOP layanan. Selain itu, Biro Hukum dan Reputasi juga memperoleh berbagai penghargaan seperti predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat, penghargaan dari PR Indonesia atas media sosial dan *annual report*, penghargaan untuk Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik dari Anugerah Humas Indonesia (AHI), serta mendapatkan Predikat A- dengan nilai 4,47 berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah 2023 dari Kementerian PANRB.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang sudah baik ini, rencana tindak ke depan yang akan dilakukan oleh Biro Hukum dan Komunikasi adalah melakukan sosialisasi dan internalisasi mengenai risiko hukum, penguatan kebijakan layanan komunikasi dan informasi, serta optimalisasi kanal komunikasi BPKP seperti laman BPKP, PPID, media sosial, majalah, dll.

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023 merupakan refleksi dari upaya dan dedikasi yang telah dilakukan selama periode tahun 2023. Melalui laporan ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai kegiatan, pencapaian, dan tantangan selama masa pelaporan serta rencana aksi yang akan dilakukan di mana mendatang.

Biro Hukum dan Komunikasi menjalankan program dukungan manajemen melalui *protection* dan *branding*. *Protection* diwujudkan dalam tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan. Sedangkan, *branding* diwujudkan dalam tugas melaksanakan komunikasi dan informasi publik.

Kami berharap laporan ini bukan hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga sarana untuk berkomunikasi secara transparan kepada semua pihak yang terlibat serta pendorong bagi *stakeholders* internal dan eksternal kami, agar dapat melaksanakan dengan baik tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami.

Seluruh pencapaian kinerja dalam laporan ini mungkin tidak tercapai tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh tim Biro Hukum dan Komunikasi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan oleh seluruh anggota tim Biro Hukum dan Komunikasi. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi pengembangan kedepannya.

Plh. Kepala Biro

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Nurly Wulan Sari



# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	v
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>A Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Struktur Organisasi .....</b>	<b>2</b>
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan.....	2
2. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum.....	3
3. Bagian Komunikasi dan Informasi .....	3
4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	4
<b>C. Isu-isu Strategis Organisasi.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Sistematika Laporan.....</b>	<b>6</b>
<b>Bab II Perencanaan Kinerja.....</b>	<b>7</b>
<b>A Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020-2024 .....</b>	<b>7</b>
<b>B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian     Kinerja Tahun 2023 .....</b>	<b>8</b>
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>10</b>
<b>A Kerangka Pengukuran Kinerja.....</b>	<b>10</b>
<b>B. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>.....</b>	<b>11</b>
1. Sasaran Kegiatan 1 .....	12
1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan .....	12
1.2 Persentase Layanan Legislasi yang Diselesaikan sesuai dengan SOP .....	13
2. Sasaran Kegiatan 2.....	13
3. Sasaran Kegiatan 3.....	14
4. Sasaran Kegiatan 4.....	17
a. Umum.....	17
b. Hasil survei .....	17

<b>C. Capaian Kinerja <i>Output</i></b> .....	20
1. Indikator Output Kegiatan 1.....	20
2. Indikator Output Kegiatan 2.....	24
3. Indikator Output Kegiatan 3.....	26
<b>D. Akuntabilitas Keuangan</b> .....	28
<b>E. Penggunaan Sumber Daya Manusia</b> .....	28
<b>F. Analisis Efisiensi</b> .....	29
<b>G. Kinerja Lainnya</b> .....	30
<b>Bab IV Penutup</b> .....	32
<b>A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023</b> .....	32
<b>B. Rencana Tindak Tahun 2024</b> .....	33
<b>Lampiran I</b> .....	1
<b>Lampiran II</b> .....	2
<b>Lampiran III</b> .....	3
<b>Lampiran IV</b> .....	4

# Daftar Tabel

Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024	7
Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023	8
Tabel 3 – Perbandingan Target Kinerja	9
Tabel 4 – Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024	11
Tabel 5 – Pertanyaan Survei dan Nilainya	18
Tabel 6 – Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023	20
Tabel 7 – Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023	28
Tabel 8 – Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023	29

# Daftar Grafik

Grafik 1 – Nilai Indeks Reputasi BPKP Tahun 2023	16
Grafik 2 – Posisi BPKP Dalam Peta Reputasi Tahun 2023	16
Grafik 3 – Rincian Unsur Nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi 2023	18



**FGD Indeks Reputasi (Atas)  
Workshop Media Komunikasi Berbasis Data dalam  
Pengelolaan Branding Organisasi (Bawah)**

# Bab I Pendahuluan

## A. Tugas dan Fungsi

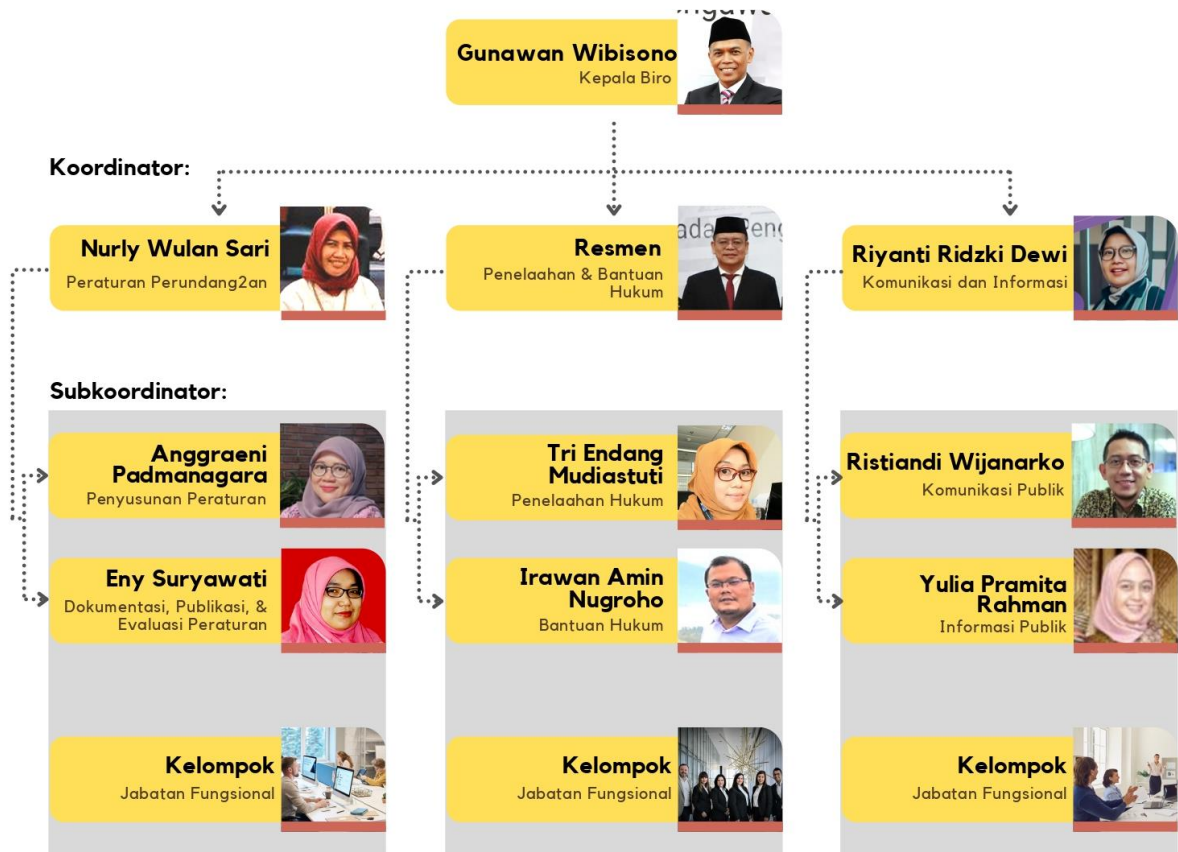
Biro Hukum dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan serta komunikasi dan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman.
- 2) Pembinaan dan pelayanan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi dan publikasi serta evaluasi peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum.
- 4) Pembinaan dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.
- 5) Pembinaan dan pelayanan penyuluhan hukum.
- 6) Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi.
- 7) Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik.



## B. Struktur Organisasi



Biro Hukum dan Komunikasi terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, serta Bagian Komunikasi dan Informasi.

### 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman serta dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan internal BPKP dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman dan penyiapan bahan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Peraturan, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis, perancangan, penyusunan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman.
- 2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Evaluasi Peraturan, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan dokumentasi, pemberian informasi dan publikasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

## **2. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum**

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyediaan pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi penyediaan bahan penelaahan hukum dan pemberian pendapat hukum dan penyediaan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Bagian Penelaahan dan Bantuan hukum dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penelaahan Hukum, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan dan pemberian pendapat hukum.
- 2) Subbagian Bantuan Hukum, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

## **3. Bagian Komunikasi dan Informasi**

Bagian Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi dan informasi internal dan eksternal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyediaan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik dan antarlembaga dan penyediaan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.

Bagian Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Koordinator dan terdiri dari:

- 1) Subbagian Komunikasi Publik, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik, dan antarlembaga.
- 2) Subbagian Informasi Publik, yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berada langsung di bawah setiap subkoordinator yang memiliki tugas secara spesifik sesuai dengan subbagiannya masing-masing.

### C. Isu-isu Strategis Organisasi

Biro Hukum dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan serta komunikasi dan informasi publik. Berdasarkan tugas tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi memiliki dua aspek strategis yaitu aspek *protection* dan aspek *branding* sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKP.

Aspek *protection* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai kepada seluruh pegawai BPKP ketika menjalankan tugas mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan pemerintah. Aspek proteksi memastikan bahwa struktur kelembagaan, kebijakan, maupun pelaksanaan operasi kegiatan BPKP telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada aspek ini terdapat sembilan layanan, yaitu:

- a. Bidang Peraturan Perundang-undangan
  - 1) *Legislative/legal drafting*.
  - 2) Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian/kontrak/nota kesepahaman.
  - 3) Dokumentasi peraturan dalam JDIH BPKP dan Warga BPKP.
- b. Bidang Penelaahan dan Bantuan Hukum
  - 1) Pemberian pendapat hukum.
  - 2) Penanganan perkara.
  - 3) Pemberian konsultasi hukum.
  - 4) Penyuluhan hukum.

5) Ekspose intern dan ekstern.

6) Pendampingan hukum.

Di sisi lain, aspek *branding* memiliki tujuan untuk membangun citra positif BPKP di mata publik. Pada aspek ini terdapat enam layanan yaitu:

1) Layanan informasi publik (PPID BPKP).

2) Layanan pengaduan publik (BPKP Kawal, SP4NLAPOR, dan kanal komunikasi lainnya).

3) Layanan Manajemen Isu.

4) Layanan Pengelolaan Media Sosial (Instagram, Facebook, X, Youtube).

5) Monitoring Website.

6) Pengelolaan Berita Harian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, isu-isu strategis yang dihadapi Biro Hukum dan Komunikasi diantaranya yaitu:

1) Kepatuhan hukum (*compliance*)

Memastikan seluruh pegawai BPKP memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

2) Manajemen risiko hukum

Memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3) Manajemen isu

Mengidentifikasi, menjabarkan kronologi, memahami, dan mengelola isu yang dapat mempengaruhi reputasi BPKP.

4) Komunikasi krisis

Menyiapkan strategi komunikasi yang efektif ketika menghadapi krisis sehingga dapat meminimalkan dampak negatif krisis.

5) Pengelolaan informasi

Mengelola layanan informasi publik dengan tetap memperhatikan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPKP.

## D. Sistematika Laporan

Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

a) BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu-isu strategis organisasi dan sistematika laporan.

b) BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan indikator dan target kinerja tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2023, dan perbandingan target tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

c) BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan kerangka pengukuran kinerja, capaian kinerja *outcome*, capaian kinerja *output*, akuntabilitas keuangan, penggunaan sumber daya manusia, analisis efisiensi, dan kinerja lainnya.

d) BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan kinerja tahun 2023 dan rencana tindak tahun 2024.



**Sosialisasi Tim Teknis Proteksi Hukum Unit Kerja (Atas)**  
**Sosialisasi Efektivitas Tim Teknis Proteksi Hukum (Bawah)**

# Bab II Perencanaan Kinerja

## A. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja periode jangka menengah Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP. Target kinerja tersebut disajikan dalam tabel 1 yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target per tahun sepanjang periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17
		1.2 Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP (1)	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP (2)	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	n/a	70	70	70	70
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69	8,71	8,72

(1) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP" pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan" merupakan IKK yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja

tahun 2023, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2023 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 100%.

- (2) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2021 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 70%.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16
		1.2 Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai SOP	(%) Persen	100
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	2.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	(%) Persen	70
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	3.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	76
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	4.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,71

## C. Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP tahun 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 disajikan dalam tabel 3 berikut.



**Tabel 3 - Perbandingan Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	
				Renstra	Perkin
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16	3,16
		1.2 Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai SOP	(%) Persen	-	100
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	2.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	(%) Persen	-	70
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	3.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	76	76
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	4.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,71	8,71



**Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern  
2023 (Atas)  
Press Conference Rapat Koordinasi Pengawasan  
Intern 2023 (Bawah)**

# Bab III Akuntabilitas Kinerja

## A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didasarkan pada satuan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

- 1) Indeks RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan” diukur oleh Kementerian PAN RB;
- 2) Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP Layanan legislasi dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada;
- 3) Indeks Reputasi BPKP diukur melalui penyebaran survei kepada masyarakat reputasi BPKP yaitu masyarakat umum, media massa, dan mitra kerja BPKP;
- 4) Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi diukur melalui penyebaran survei kepada responden yang pernah menerima layanan Biro Hukum dan Komunikasi;
- 5) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah permintaan dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara.

## B. Capaian Kinerja Outcome

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki **empat** sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan **lima** indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, **kelima** indikator kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 4.

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Kinerja Outcome												Ket.	
				Target					Realisasi				Capaian (%)				
				'20	'21	'22	'23	'24	'20	'21	'22	'23	'20	'21	'22		'23
1	2	3	4	5					6				7=6/5				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17	3,13	4,44	4,44	4,44	99,37	140,95	140,51	140,51	Melampaui target
		1.2 Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen				100	100				100				100	Mencapai target
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	2.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen		70	70 1)	72	73		96,30	98,65	100		137,57	140,93	138,89	Melampaui target
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	3.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78	71	73,35	75,43	77,25	101,43	101,88	101,93	101,64	Melampaui target
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	4.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69 2)	8,71	8,72	8,73	8,36	8,74	8,72	100,58	96,20	100,58	100,11	Melampaui target

**Tabel 4 - Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024**

- 1) Target Indikator Kinerja Kegiatan sasaran kegiatan 3: “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” menggunakan target Perkin 2023 (8,71), tidak menggunakan target Renstra (8,70).
- 2) Target Indikator Kinerja Kegiatan sasaran kegiatan 4 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” menggunakan target Perkin 2023 (72), tidak menggunakan target yang telah ditetapkan sebelumnya (71).

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. Sasaran Kegiatan 1

### 1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” dengan IKK “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” memiliki target tahun 2023 sebesar 3,16.

Pada triwulan 4 Tahun 2023, realisasi Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB tahun 2023 masih menggunakan angka capaian tahun 2020 karena data untuk capaian tahun 2022 belum didapatkan dari Kementerian PAN RB. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja 2022 (yang dilaporkan di 2023) telah melebihi target tahun 2023 dan 2024 sekaligus. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 sama dengan realisasi kinerja tahun 2022.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya koordinasi dengan unit kerja pemrakarsa serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan kompetensi teknis hukum seperti penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Fungsional Peraturan Perundang-undangan bagi Fungsional Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
- 2) melakukan kegiatan identifikasi, analisis, pemetaan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan;
- 3) mengevaluasi peraturan perundang-undangan untuk mendeteksi ada/tidaknya tumpang tindih, disharmonisasi, multitafsir dan tidak efektif, dan
- 4) mengevaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

## 1.2 Persentase Layanan Legislasi yang Diselesaikan sesuai dengan SOP

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” dengan IKK “Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP” memiliki target tahun 2023 sebesar 100%.

Pada triwulan 4 Tahun 2023, realisasi Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP telah mencapai 100% target.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) adanya dukungan dari organisasi dan sumber daya manusia untuk menyelesaikan target kinerja;
- 2) seluruh Perancang Peraturan Ahli Pertama telah ikut dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama di BPSDM Kemenkumham; dan
- 3) adanya koordinasi yang baik dengan instansi eksternal BPKP yaitu Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPSDM Kemenkumham dan Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan kompetensi pegawai dengan melalui pelatihan legislative drafting dan pelatihan materi lainnya/bimbingan teknis yang mendukung tercapainya kinerja; dan
- 2) melakukan kegiatan identifikasi, analisis, harmonisasi, pemetaan dan/atau revisi atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

## 2. Sasaran Kegiatan 2

IKK “Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan” diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP, dengan realisasi sebagai berikut:

### 1. Pendapat Hukum.

Permintaan pendapat hukum tahun 2023 sebanyak 32 pendapat hukum dan telah 100% dipenuhi.

### 2. Berkas Perkara di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkas yang harus disampaikan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 57 berkas perkara dan telah 100% dipenuhi.

Dengan demikian, realisasi kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan tahun 2023 yaitu 100%. Nilai tersebut meningkat 1,35 % dari realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 98,65%. Realisasi kinerja tersebut jauh melebihi target 2023 yang telah ditetapkan sebesar 70% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 138,89%. Jika dibandingkan dengan target persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan tahun 2024 sebesar 73%, maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai 136,99%.

Komitmen pegawai pada Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menjadi faktor pendukung tercapainya target kinerja. Faktor pendukung tersebut ditunjukkan dalam upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja berupa peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat dan FGD dengan mengundang narasumber atau praktisi dan melibatkan Tim Proteksi Hukum Unit Kerja.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kompetensi SDM bidang hukum secara berkelanjutan,
2. sosialisasi dan internalisasi risiko hukum dalam tugas pengawasan secara berkelanjutan, dan
3. pemberian bantuan hukum atas komplain/gugatan terhadap BPKP, pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi hukum, dan pendampingan hukum terhadap pegawai BPKP yang dipanggil sebagai saksi/ahli di hadapan penyidik/pengadilan tipikor.

### 3. Sasaran Kegiatan 3

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan

masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, dan mitra kerja BPKP. Survei dilaksanakan selama 8 hari kerja, mulai tanggal 13 sampai dengan 22 November 2023. Komposisi responden yaitu sebanyak 80% masyarakat umum dan media massa, 20% mitra kerja. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Google Sheet dan perangkat lunak pengolah data SmartPLS. Sebanyak 4.939 masyarakat menjadi responden survei tahun 2023 atau naik 23,38% atau 936 responden dibandingkan tahun 2022 (4.003 responden). Hal ini menunjukkan penguatan pengelolaan hubungan dengan Masyarakat Reputasi BPKP.

Perkembangan pengukuran reputasi BPKP dikembangkan oleh Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 terdapat rekonstruksi indeks reputasi, piloting kuesioner, dan pengukuran indeks reputasi.

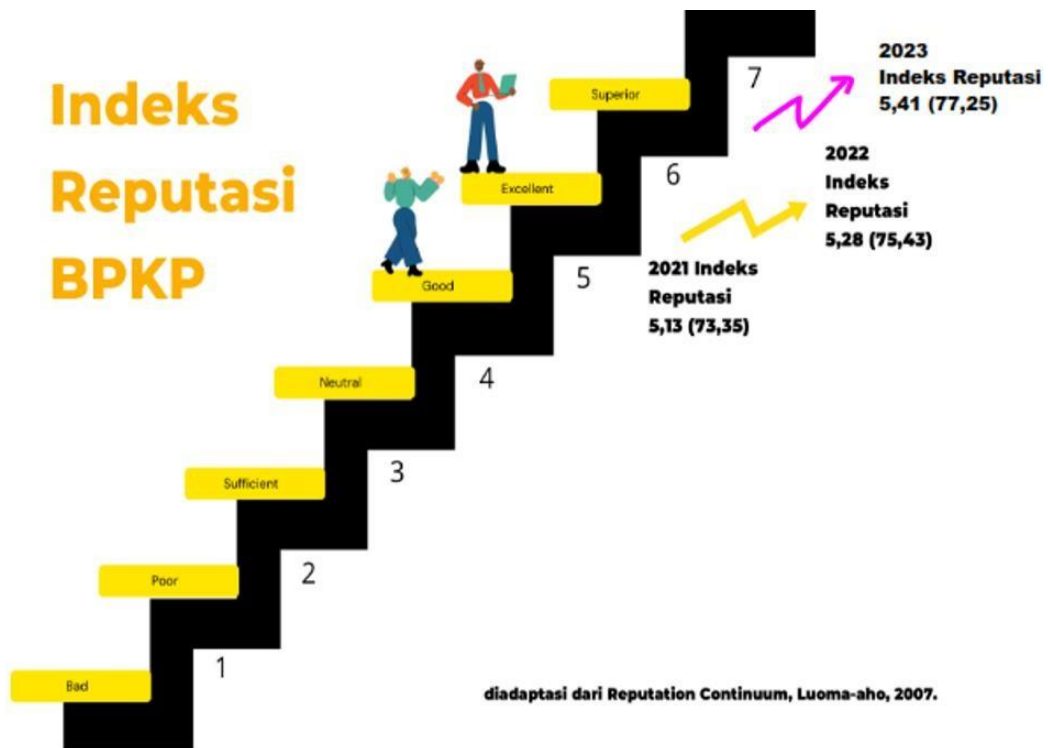
Model Indeks Reputasi BPKP memiliki tujuh variabel yang terdiri dari variabel Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, Daya Tarik, Kompetensi, Simpati, dan Loyalitas. Tujuh variabel tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 31 indikator yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut:

*1. Bad – 2. Poor – 3. Sufficient – 4. Neutral – 5. Good – 6. Excellent – 7. Superior.*

Pada tahun 2023, target Indeks Reputasi BPKP adalah 76 dari skala 100 atau 5,41 dari skala 7. Hasil Indeks Reputasi BPKP tahun 2023 sebesar 5,41 dari skala 7, atau 77,25 dari skala 100. Merujuk pada nilai Indeks Reputasi BPKP tersebut maka BPKP berada pada kategori “Good”. Dengan demikian, capaian Indeks Reputasi BPKP tahun 2023 sebesar 101,64% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target Indeks Reputasi BPKP tahun 2024 sebesar 78, maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai 99,04%. Realisasi Indeks Reputasi BPKP dari tahun 2020 hingga kini pun terus mengalami peningkatan. Realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2023 ini naik 1,82 atau 2,41% dari realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2022 yaitu 75,43 yang naik 2,08 atau 2,84% dari realisasi Indeks Reputasi BPKP tahun 2021.

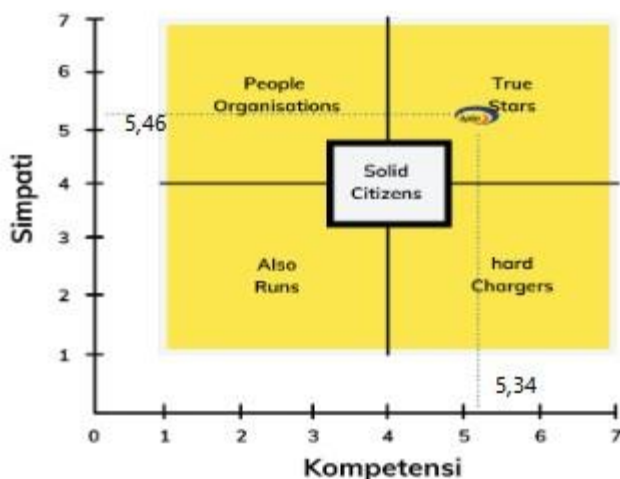


**Grafik 1 – Nilai Indeks Reputasi BPKP Tahun 2023**



Analisis atas penilaian dari Masyarakat Reputasi BPKP juga dapat diukur melalui pemetaan reputasi, dengan mengukur posisi BPKP dalam dua variabel yaitu kompetensi dan simpati. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka BPKP berada di posisi “*TrueStars*”. Posisi ini menunjukkan bahwa BPKP telah dinilai oleh Masyarakat Reputasi menjadi organisasi yang telah difokuskan tidak hanya pada pencapaian kinerjanya saja tetapi juga diimbangi dengan terus mempromosikan nilai-nilai humanis dalam aktivitas yang dilakukan.

**Grafik 2 – Posisi BPKP Dalam Peta Reputasi Tahun 2023**



Faktor pendukung tercapainya kinerja dalam meningkatkan reputasi BPKP adalah koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPKP. Hal ini dikarenakan pengelolaan identitas dan citra yang kolaboratif diperlukan untuk mengurangi *gap* antara fakta dan citra yang dipersepsikan oleh masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kinerja, diantaranya adalah penyusunan Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (SPIK) Tahun 2023, kampanye program, *agenda setting* bulanan, pengelolaan *owned* media BPKP, serta pengelolaan layanan informasi.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan komunikasi kepada masyarakat umum melalui laman BPKP dan PPID, media sosial, majalah, company visit dan pameran/eksibisi;
2. Penguatan interaksi dengan media melalui siaran pers, konferensi pers, media gathering, media visit;
3. Penguatan keterlibatan mitra kerja melalui forum kehumasan, event/ seminar, kolaborasi antar Badan Publik dan Komisi Informasi.

## 4. Sasaran Kegiatan 4

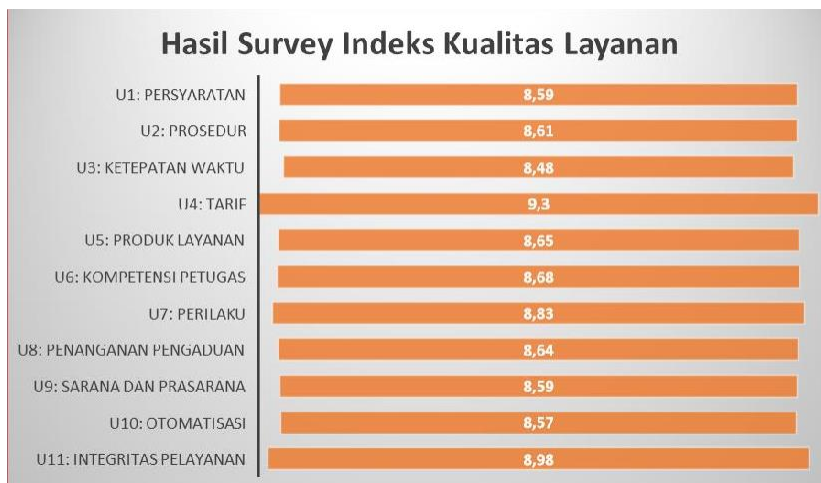
### a. Umum

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2023 sebesar 8,71. Responden survei Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023 merupakan pegawai dari tiap unit kerja di lingkungan BPKP yang pernah menerima layanan Biro Hukum dan Komunikasi. Total responden yang telah mengisi survei adalah 353 responden. Survei dilakukan terhadap 11 aspek, yaitu: Persyaratan, Prosedur, Ketepatan Waktu, Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Petugas, Perilaku, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana, Otomatisasi dan Integritas Pelayanan.

### b. Hasil survei

Berdasarkan hasil survei, nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) Biro Hukum dan Komunikasi adalah 8,72 atau mencapai 100,11% dari target tahun 2023 sebesar 8,71.

### Grafik 3 – Rincian Unsur Nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi 2023



Adapun rincian pertanyaan survei dan nilai indeksnya masing-masing disajikan dalam tabel 5 berikut:

**Tabel 5 – Pertanyaan survei dan Nilainya**

Unsur	Indikator	Nilai (Skala 1-10)
Persyaratan	1 Persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan layanan telah sesuai dengan persyaratan yang telah diinformasikan.	8,59
Prosedur	2 Prosedur pelayanan mudah dipahami dan diterapkan.	8,61
Ketepatan Waktu	3 Jangka waktu pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan	8,48
Tarif	4 Pegawai tidak pernah memungut biaya atau keuntungan ekonomi lainnya dalam memberikan pelayanan.	9,30
Produk Layanan	5 Pengelolaan reputasi BPKP di bidang proteksi (layanan hukum) dan branding (layanan kehumasan) telah sesuai dengan harapan Anda	8,65
Kompetensi Petugas	6 Pegawai memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan pelayanan.	8,68
Perilaku	7 Pegawai melayani Anda dengan sopan dan ramah.	8,83
Penanganan Pengaduan	8 Pegawai menanggapi pengaduan dengan cepat, tepat dan jelas.	8,64
Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan prasarana yang disediakan telah mendukung pemberian layanan.	8,59
Otomatisasi	10 Kecepatan respon, kemudahan fitur, dan kualitas konten pada website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) atau website Layanan Informasi	8,57

		Publik (e-PPID) BPKP telah sesuai dengan harapan Anda.	
Integritas Pelayanan	11	Pegawai telah mengedepankan prinsip transparansi dan menghindari perilaku KKN dalam memberikan pelayanan.	8,98
Rata-rata			8,72

Berdasarkan hasil survei pada Tabel 4, nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) Biro Hukum dan Komunikasi adalah 8,72 atau 100,11% dari target IKL 2023 sebesar 8,71. Nilai IKL sebesar 8,72 menunjukkan bahwa secara umum responden telah merasa puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sepanjang tahun 2023. Realisasi IKL 2023 lebih rendah 0,02 dari realisasi IKL 2022. Hal ini dapat disebabkan dengan meningkatnya jumlah responden survei. Jika dibandingkan dengan target IKL Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2024 sebesar 8,72, maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai 100%.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Hukum dan Komunikasi untuk mendukung tercapainya kinerja, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas hasil survei kualitas layanan tahun 2022, mengadakan rapat internal guna meningkatkan kualitas layanan, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh atasan, serta berdiskusi dengan Biro MKOT dalam rangka Survei Indeks Kualitas Layanan Kebiroan Tahun 2023.

Faktor pendukung atas ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) SDM yang kompeten dan selalu mendukung;
- 2) Hubungan kerja yang harmonis;
- 3) Peralatan pendukung yang memadai;
- 4) Pengguna layanan yang kooperatif;
- 5) Sistem dan prosedur layanan;
- 6) Penambahan dan refreshment staf.

Rencana tindak ke depan sebagai upaya untuk mempertahankan capaian yang baik sekaligus meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun Peraturan BPKP tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 2) Memperbarui Standar Operasional Prosedur tentang Layanan Informasi Publik.
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Pengaduan Publik.
- 4) Melakukan penguatan dan pembinaan SDM dan lembaga kehumasan.
- 5) Penguatan kelembagaan PPID melalui pembinaan dan monev PPID unit kerja, Forum Kehumasan.
- 6) Melakukan revitalisasi website (migrasi website) yang bekerja sama dengan Pusinfowas BPKP.

- 7) Menambah kanal komunikasi media sosial dan optimalisasi kanal komunikasi yang telah dimiliki.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan komunikasi termasuk inklusivitas (kamera, video dan ruang kerja komunikasi dan informasi guna pembuatan konten-konten informasi, serta penyediaan ruang untuk pemohon layanan inklusif).

### C. Capaian Kinerja Output

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebanyak tiga indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6 – Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023**

No	Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	Output		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	15	100%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	30	100%
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	72	72	100%

Dari tabel 6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Indikator Output Kegiatan 1

IOK “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian Peraturan Perundang-undangan.

IOK “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat realisasi output berupa kegiatan atau mencapai 100% dari target yaitu dapat dibagi ke dalam 15 kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP. Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan *legislative drafting* atas 26 produk hukum BPKP, yang terdiri atas:
  - a) 2 (dua) draft Peraturan BPKP;
  - b) 18 (delapan belas) draft Peraturan Deputi;
  - c) 4 (empat) draft keputusan Kepala BPKP;
  - d) 1 (satu) draft Keputusan Sekretaris Utama; dan
  - e) 1 (satu) draft Keputusan Inspektur BPKP.

- 2) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU I

Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan legal drafting atas 12 draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas:

- a) 5 (lima) draft MoU; dan
- b) 7 (tujuh) draft PKS.

- 3) Penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan produk hukum BPKP.

Abstrak peraturan perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.

Dalam triwulan ini, penyusunan abstrak dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan 22 (dua puluh dua) Peraturan BPKP.

- 4) Evaluasi Pengelolaan Peraturan-undangan Tingkat Nasional dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I.

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas peraturan perundang-undangan tingkat nasional sesuai Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan mengunggah Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah mengelola sebanyak 112 (seratus dua belas ) peraturan, yang terdiri dari 16 (enam belas) Undang-Undang (UU), 35 (tiga puluh lima) Peraturan Pemerintah (PP), 45 (empat puluh lima) Peraturan Presiden (Perpres), 16 (enam belas), Keputusan Presiden (Keppres), dan 3 (tiga) Instruksi Presiden (Inpres).

- 5) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I.

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas Peraturan BPKP sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan mengupload Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II Thn 2023 mengelola sebanyak 3 (tiga) Peraturan BPKP, 1 (satu) Keputusan Kepala BPKP dan 2 (dua) Surat Edaran Kepala BPKP.

6) Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan I.

Kegiatan analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu memberi gambaran, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

7) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan I.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kegiatan evaluasi dan *legislatif drafting* Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mendeteksi ada/tidaknya peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

8) Penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan secara tematik.

Kegiatan ini menghimpun peraturan perundang-undangan berdasarkan tematik. Pada Tahun 2023, tema yang dihimpun berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri.

9) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU II

Pada triwulan II dan III telah dilakukan proses analisis dan legal drafting atas 32 draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas:

- a) 14 (empat belas) draft MoU; dan
- b) 18 (delapan belas) draft PKS.

10) Penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan produk hukum BPKP II.

Dalam triwulan ini, penyusunan abstrak dilakukan terhadap 50 (lima puluh) Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional.

11) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum II.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah mengelola sebanyak 112 (seratus dua belas) peraturan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Undang-Undang (UU), 36 (tiga puluh

enam) Peraturan Pemerintah (PP), 56 (lima puluh enam) Peraturan Presiden (Perpres), 21 (dua puluh satu), Keputusan Presiden (Keppres), dan 3 (tiga) Instruksi Presiden (Inpres).

12) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP. Dari Triwulan II sampai dengan triwulan IV telah dilakukan proses analisis dan *legislative drafting* atas 104 produk hukum BPKP, yang terdiri atas:

- a. 8 (delapan) draft Peraturan BPKP;
- b. 62 (enam puluh dua) draft Peraturan Deputi;
- c. 16 (enam belas) draft keputusan Kepala BPKP;
- d. 6 (enam) draft Keputusan JPT Madya Pratama;
- e. 4 (empat) Keputusan JPT Pratama;
- f. 4 (empat) Surat Edaran Kepala BPKP;
- g. 4 (empat) Surat Edaran JPT Madya.

13) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan II.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kegiatan evaluasi dan *legislatif drafting* Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mendeteksi ada/tidaknya peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

14) Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan II.

Kegiatan analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu memberi gambaran, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

15) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum II.

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas Peraturan BPKP sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan mengupload Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan 4 Thn 2023 mengelola sebanyak 8 (delapan) Peraturan BPKP, 1 (satu) Keputusan Kepala BPKP dan 2 (dua) Surat Edaran Kepala BPKP.



## 2. Indikator Output Kegiatan 2

IOK “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum.

Realisasi *output* sebanyak 30 laporan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Pendapat Hukum atas Pengadaan Gedung *Smart Building*;
- 2) Pendapat Hukum terkait Ganti Rugi bagi Korban yang mengalami Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGPA) pada Anak;
- 3) Pendapat Hukum terkait Surat Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON XX Provinsi Papua;
- 4) Pendapat Hukum terkait Hukuman Disiplin;
- 5) Penanganan Perkara Gugatan Perdata Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga Smg di PN Semarang;
- 6) Penanganan Sengketa Informasi Publik Nomor 25/IX/KISB-PS/2022 tanggal di Komisi Informasi Publik Sumatera Barat;
- 7) Penanganan Sengketa Informasi Publik Nomor 22/V/KIP-PS/2019 di Komisi Informasi Pusat;
- 8) Pendampingan terhadap Pegawai BPKP yang memberikan keterangan di Kejaksaan Agung sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyelewengan dalam tata kelola pupuk bersubsidi Tahun 2017-2022;
- 9) Pendapat Hukum terkait Pembiayaan Akomodasi Hotel, Transportasi, dan Konsumsi untuk Penyelenggaraan Kegiatan ANOC Annual General Assembly Tahun 2023 melalui APBN, Surat No: HK.03/R/S-401/SU04/2/2023, tanggal 22 Mei 2023;
- 10) Pendapat Hukum terkait Rencana Penugasan Audit PKKN Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I s.d. Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, Surat No: HK.03/R/S-439/SU04/2/2023, tanggal 29 Mei 2023;
- 11) Pendapat Hukum terkait Penugasan Pegawai BPKP Aktif di Komite BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, Surat No: HK.03/SR/S-454/SU04/2/2023, tanggal 31 Mei 2023;
- 12) Pendapat Hukum terkait Permintaan Opini Hukum atas Penerbitan Surat Utang PT Perusahaan Pengelola Aset, Surat No: HK.03/R/S-469/SU04/2/2023, tanggal 9 Juni 2023;
- 13) Pendapat Hukum terkait Permasalahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) pada Proyek Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- 14) Pendapat hukum terkait Permohonan Penugasan Reviu pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta;
- 15) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Bgr di PN Bogor;

- 16) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bks di PN Bekasi pada tingkat Banding;
- 17) Pendampingan terhadap pegawai BPKP yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pembangunan prasarana kereta api ringan/light rail transit Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Bareskrim Polri (31 Mei 2023);
- 18) Pendampingan terhadap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri (8 Juni 2023);
- 19) Pendapat Hukum terkait Jawaban Kepala BPKP;
- 20) Pendapat Hukum terkait Peraturan Eksternal;
- 21) Pendapat Hukum atas Kontrak Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2021;
- 22) Masukan terkait Permintaan Opini Hukum atas Hasil Verifikasi Dokumen atas Kasus Hukum Ex RUI-Equitas pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero);
- 23) Pendapat Hukum terkait Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah yang dibebankan pada APBD apabila dialihkan menjadi beban APBN;
- 24) Penanganan perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2023/PTUN.SBY di PTUN Surabaya;
- 25) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Tte di PN Ternate;
- 26) Pendampingan terhadap pensiunan pegawai BPKP yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Ir. Dudy Jocom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat;
- 27) Pendapat Hukum terkait Penggunaan Hak Intervensi dalam Proses Penyelesaian Administrasi Kontrak Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III oleh PT Jasamarga Japek Selatan;
- 28) Pendapat Hukum atas Rencana Pembentukan Anak Usaha Perum Percetakan Negara RI;
- 29) Penanganan perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 41/G/2023/PTUN.SMG di PTUN Semarang;
- 30) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 456/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan.

### 3. Indikator Output Kegiatan 3

IOK “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan IV sebanyak 6 layanan yang dirincikan ke dalam 72 laporan atau mencapai 100% dari target tahun 2023 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Layanan Informasi Publik
  - a. Laporan layanan informasi publik bulan Januari tahun 2023
  - b. Laporan layanan informasi publik bulan Februari tahun 2023
  - c. Laporan layanan informasi publik bulan Maret tahun 2023
  - d. Laporan layanan informasi publik bulan April tahun 2023
  - e. Laporan layanan informasi publik bulan Mei tahun 2023
  - f. Laporan layanan informasi publik bulan Juni tahun 2023
  - g. Laporan layanan informasi publik bulan Juli tahun 2023
  - h. Laporan layanan informasi publik bulan Agustus tahun 2023
  - i. Laporan layanan informasi publik bulan September tahun 2023
  - j. Laporan layanan informasi publik bulan Oktober tahun 2023
  - k. Laporan layanan informasi publik bulan November tahun 2023
  - l. Laporan layanan informasi publik bulan Desember tahun 2023
- 2) Layanan Pengelolaan Pengaduan Publik
  - a. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Januari tahun 2023
  - b. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Februari tahun 2023
  - c. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Maret tahun 2023
  - d. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan April tahun 2023
  - e. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Mei tahun 2023
  - f. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Juni tahun 2023
  - g. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Juli tahun 2023
  - h. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Agustus tahun 2023
  - i. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan September tahun 2023
  - j. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Oktober tahun 2023
  - k. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan November tahun 2023
  - l. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Desember tahun 2023
- 3) Layanan Manajemen Isu
  - a. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2023
  - b. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Februari 2023
  - c. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2023
  - d. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan April 2023

- e. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Mei 2023
  - f. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Juni 2023
  - g. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Juli 2023
  - h. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Agustus 2023
  - i. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan September 2023
  - j. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Oktober 2023
  - k. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan November 2023
  - l. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Desember 2023
- 4) Layanan Pengelolaan Media Sosial
- a. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2023
  - b. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2023
  - c. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Maret 2023
  - d. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan April 2023
  - e. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Mei 2023
  - f. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juni 2023
  - g. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juli 2023
  - h. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Agustus 2023
  - i. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan September 2023
  - j. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Oktober 2023
  - k. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan November 2023
  - l. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Desember 2023
- 5) Laporan Monitoring Website
- a. Laporan monitoring laman BPKP bulan Januari 2023
  - b. Laporan monitoring laman BPKP bulan Februari 2023
  - c. Laporan monitoring laman BPKP bulan Maret 2023
  - d. Laporan monitoring laman BPKP bulan April 2023
  - e. Laporan monitoring laman BPKP bulan Mei 2023
  - f. Laporan monitoring laman BPKP bulan Juni 2023
  - g. Laporan monitoring laman BPKP bulan Juli 2023
  - h. Laporan monitoring laman BPKP bulan Agustus 2023
  - i. Laporan monitoring laman BPKP bulan September 2023
  - j. Laporan monitoring laman BPKP bulan Oktober 2023
  - k. Laporan monitoring laman BPKP bulan November 2023
  - l. Laporan monitoring laman BPKP bulan Desember 2023
- 6) Laporan Pengelolaan Berita Harian
- a. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Januari 2023
  - b. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2023
  - c. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2023

- d. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan April 2023
- e. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Mei 2023
- f. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juni 2023
- g. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juli 2023
- h. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Agustus 2023
- i. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan September 2023
- j. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Oktober 2023
- k. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan November 2023
- l. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Desember 2023

## D. Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7 – Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023**

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	330.872.000	330.681.390	99,94
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	919.248.000	918.750.749	99,95
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.528.835.000	1.520.692.975	99,47
<b>Jumlah</b>		<b>2.778.955.000</b>	<b>2.770.125.114</b>	<b>99,79</b>

Dari total anggaran sebesar Rp2.778.955.000, realisasi belanja sebesar Rp2.770.125.114 atau sebesar 99,79%. Dengan persentase mendekati 100%, penyerapan anggaran Biro Hukum dan Komunikasi tergolong sangat baik.

## E. Penggunaan Sumber Daya Manusia

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 disajikan pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8 – Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023**

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Rencana (OH)	Realisasi (OH)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2600	2661	102.3%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	3400	3489	102.6%
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5857	6121	104.5%
<b>Jumlah</b>		<b>11857</b>	<b>12271</b>	<b>103.5%</b>

Realisasi penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebesar 12.271 OH dari target 11.857 OH atau 103,5%. Hal ini menunjukkan begitu banyaknya permintaan layanan yang dipenuhi oleh Biro, baik dari sisi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta kehumasan.

## F. Analisis Efisiensi

### Kinerja Outcome

Dalam upayanya mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Biro Hukum dan Komunikasi telah efisien dalam menggunakan sumber daya keuangan (*well spending*). Hal ini terlihat dari seluruh capaian kinerja kegiatan yang telah melebihi 100% (dapat dilihat pada Tabel 4) serta capaian indikator output kegiatan yang telah mencapai 100% (dapat dilihat pada Tabel 6), lebih besar dari total persentase realisasi belanja sebesar 99,79% (dapat dilihat pada Tabel 7).

Dari perspektif penggunaan sumber daya manusia, terlihat bahwa:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan IKK pada bagian Peraturan Perundang-undangan sebesar 120,26% lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sumber daya manusianya sebesar 102,3% (dapat dilihat pada Tabel 8). Nilai IKK tersebut berasal dari rata-rata IKK “Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan” sebesar 140,51% dan IKK “Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai SOP” sebesar 100% (dapat dilihat pada Tabel 4).
- b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Realisasi IKK “Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum” yang terselesaikan sebesar 100% (dapat dilihat pada Tabel 4). Meskipun realisasi IKK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan sumber daya manusianya sebesar 102,6% (dapat dilihat pada Tabel 8), bukan berarti tidak efisien.

Hal ini karena SDM dialokasikan agar semua permintaan pendapat hukum dan berkas perkara di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dipenuhi semua. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi IKK “Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum” tahun 2023 meningkat 1,35%.

- c. Bagian Komunikasi dan Informasi Walaupun persentase realisasi penggunaan sumber daya manusia 104,5% (dapat dilihat pada Tabel 8) lebih besar daripada capaian IKK “Meningkatnya Reputasi BPKP” sebesar 101,64% dan IKK “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” sebesar 100,11% (dapat dilihat pada Tabel 4) tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai tidak efisien. Hal ini karena banyaknya layanan yang diminta oleh unit-unit kerja *stakeholders* internal maupun pihak eksternal atas layanan kehumasan, yang menghabiskan banyak sumber daya manusia untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kehumasan Biro Hukum dan Komunikasi telah diakui dan sangat dibutuhkan oleh *stakeholders*.

*Note: Perbandingan capaian kinerja outcome, penggunaan dana, dan penggunaan sdm dapat dilihat pada lampiran I*

### **Kinerja Output**

Dalam upayanya mencapai target output kegiatan yang telah ditetapkan, Biro Hukum dan Komunikasi telah efisien dalam menggunakan sumber daya keuangan (*well spending*). Hal ini terlihat dari rata-rata capaian output kegiatan sebesar 100% lebih besar dari rata-rata persentase realisasi belanja sebesar 99,79%.

Sementara itu, rata-rata capaian output kegiatan sebesar 100% lebih rendah dari rata-rata penggunaan sumber daya manusia sebesar 103,16%. Hal tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai tidak efisien karena banyaknya kegiatan dan laporan yang membutuhkan banyak sumber daya manusia.

*Note: Perbandingan capaian kinerja output, penggunaan dana, dan penggunaan sdm dapat dilihat pada lampiran III*

## **G. Kinerja Lainnya**

Selain kinerja yang telah diuraikan di atas, sepanjang periode tahun 2023 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan baik dari pihak eksternal dan internal, yaitu:

- 1) Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat.
- 2) *Silver Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2023,
- 3) *Bronze Winner* kategori Laporan Tahunan sub kategori *Annual Report* dari PR Indonesia tahun 2023,

- 4) *Bronze Winner* kategori Pelayanan Informasi Publik subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023,
- 5) Predikat A- dengan nilai 4,47 kepada Biro Hukum dan Komunikasi BPKP berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah 2023 dari Kementerian PANRB.





- 2023 Badan Publik Informatif (Komisi Informasi Pusat)
- 2023 Silver Winner Media Sosial (PR Indonesia)
- 2023 Bronze Winner Annual Report (PR Indonesia)
- 2023 Bronze Winner Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik (Humas Indonesia)

# Bab IV Penutup

## A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023

Biro Hukum dan Komunikasi telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Secara ringkas capaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan: 140,51%;
- 2) Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai SOP: 100%;
- 3) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan: 138,89%;
- 4) Indeks Reputasi BPKP: 101,64%;
- 5) Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi: 100,11%.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Biro Hukum dan Komunikasi dalam mencapai kinerja tersebut di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan dari organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPKP;
- 3) Koordinasi dengan instansi eksternal BPKP, diantaranya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, BPSDM Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet;
- 4) Peralatan pendukung yang memadai;
- 5) Pengguna layanan yang kooperatif; dan
- 6) Sistem dan prosedur layanan.

Di luar keberhasilan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perkin 2023, Biro Hukum dan Komunikasi juga memiliki kinerja lain berupa penghargaan yang berasal dari pihak eksternal maupun internal, yaitu:

- 1) Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat;
- 2) Silver Winner kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2023;
- 3) Bronze Winner kategori Laporan Tahunan sub kategori Annual Report dari PR Indonesia tahun 2023;
- 4) Bronze Winner kategori Pelayanan Informasi Publik sub kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023; dan

- 5) Predikat A- dengan nilai 4,47 kepada Biro Hukum dan Komunikasi BPKP berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah 2023 dari Kementerian PANRB.

## **B. Rencana Tindak Tahun 2024**

Dengan capaian positif tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi tidak lantas berpuas diri. Beberapa rencana tindak yang akan dilaksanakan di tahun 2023 agar Biro dapat memberikan layanan yang lebih baik adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi risiko hukum dalam penugasan pengawasan;
- 2) Pemberian bantuan hukum atas komplain/gugatan terhadap BPKP, pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi hukum, dan pendampingan hukum;
- 3) Mengevaluasi peraturan perundang-undangan untuk mendeteksi ada/tidaknya tumpang tindih, disharmonisasi, multitafsir dan tidak efektif;
- 4) Pelayanan informasi dan komunikasi internal;
- 5) Penguatan kelembagaan PPID melalui pembinaan dan monev PPID unit kerja, Forum Kehumasan;
- 6) Penguatan kebijakan layanan komunikasi dan informasi;
- 7) Optimalisasi laman BPKP dan PPID, media sosial, majalah, company visit dan pameran/eksibisi;
- 8) Penguatan interaksi dengan media melalui siaran pers, konferensi pers, media gathering, media visit.

Lampiran I

Tabel 9 – Perbandingan Kinerja Outcome dengan Penggunaan Dana dan SDM Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Kinerja Outcome			Penggunaan Dana (Rp)			Penggunaan SDM (OH)		
				Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Rencana (OH)	Realisasi (OH)	%
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11	12	13 (12/11)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16	4,44	140,51	330.872.000	330.681.390	99,94	2600	2661	102,3
		1.2 Persentase Layanan Legislati yang diselesaikan sesuai SOP	(%) Persen	100	100	100						
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	2.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	(%) Persen	72	100	138,89	919.248.000	918.750.749	99,95	3400	3489	102,6
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	3.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	76	77,25	101,64	1.528.835.000	1.520.692.975	99,47	5857	6121	104,5
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	4.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,71	8,72	100,11						

## Lampiran II

**Tabel 10 – Perbandingan Kinerja Outcome dengan Penggunaan Dana dan SDM Tahun 2022 dan 2023**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Realisasi					
				Kinerja Outcome		Penggunaan Dana (Rp)		Penggunaan SDM (OH)	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	4,44	4,44	429.016.158	330.681.390	2.728	2661
		1.2 Persentase Layanan Legislasi yang diselesaikan sesuai SOP	(%) Persen	-	100				
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	2.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	(%) Persen	98,65	100	698.966.882	918.750.749	2.820	3489
3	Meningkatnya Reputasi BPKP	3.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	75,43	77,25	891.754.183	1.520.692.975	5.085	6121
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	4.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,74	8,72				

### Lampiran III

**Tabel 11 – Perbandingan Capaian Output Kegiatan dengan Capaian Penggunaan Dana dan SDM Tahun 2023**

No	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan	Output Kegiatan			Penggunaan Dana (Rp)			Penggunaan SDM (OH)		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9 (8/7)	10	11	12 (11/10)
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	15	100	330.872.000	330.681.390	99,94	2600	2661	102.3
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	30	100	919.248.000	918.750.749	99,95	3400	3489	102.6
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	72	72	100	1.528.835.000	1.520.692.975	99,47	5857	6121	104.5

## Lampiran IV

**Tabel 12 – Perbandingan Output Kegiatan dengan Penggunaan Dana dan SDM Tahun 2022 dan 2023**

No	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan	Realisasi					
			Output		Penggunaan Dana (Rp)		Penggunaan SDM (OH)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	15	429.016.158	330.681.390	2728	2661
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	30	698.966.882	918.750.749	2820	3489
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	72	72	891.754.183	1.520.692.975	5085	6121